

**Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota  
di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2010-2016**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Naufal Fikri Maulana  
Nomor Mahasiswa : 13313068  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS ILMU EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2010-2016

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1  
Jurusan Ilmu Ekonomi,  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Naufal Fikri Maulana  
Nomor Mahasiswa : 13313068  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

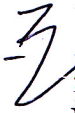
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sunggu, tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 September 2018

Penulis,

  
  
Naufal Fikri Maulana

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

**Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2010-2016**

Nama : Naufal Fikri Maulana  
Nomor Mahasiswa : 13313068  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 September 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,



Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec.,Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
BARAT (2010-2016)**

Disusun Oleh : **NAUFAL FIKRI MAULANA**

Nomor Mahasiswa : **13313068**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 17 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D.

.....  
46

Penguji : Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D

.....  
Agus Widarjono

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

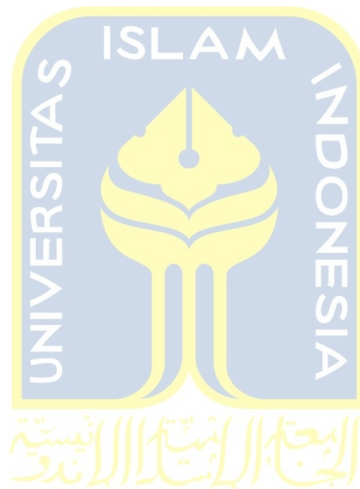
Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah serta kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk :

- Kepada yang tercinta dan yang paling kami hormati, kedua orang tua yaitu ibunda **Dr.Hj.Ria Yulia Gloria.,S.Pd.,M.Pd.** dan ayahanda **Ir.H.Mastara Junaidi.,M.Si.** yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Kepada Dosen pembimbing tugas akhir bapak **Akhsyim Afandi, Drs.,MA.Ec.,Ph.D.** Terimakasih karena dengan sabar membimbing penulis selama ini.
- Sahabat terbaik penulis, **Keluarga MTR**, Burhan, Alfi, Ijal, Fauzul, Maskur, Tomo, Satria, Arif, Yoga, Raihan, Aqil, Ikhsan, Kiemas, Aghna, Zahra, Melvin, Fadhil, Anta, Bobby, Eli, Eky, dll. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini sob, *see you on top!*
- Sahabat terbaik penulis, **Riesteny Iswin.,S.Psi.** Terimakasih atas dukungan, do'a serta kesabarannya selama menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Wish you all the best!*
- Sahabat seperjuangan di **DPM FE UII 2016/2017**. Dani, Husain, Kiemas, Tya, Iky, Ardan dan Wibowo. Terimakasih selalu, menghibur, membantu, dan memberikan nasehat.

- Keluarga Besar **Himpunan Mahasiswa Islam FE UII**. Terimakasih atas pengalamannya, Yakin Usaha Sampai!

Sekali lagi terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta medo'akan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT menjadikan itu sebagai pahala untuk kalian.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah terucap kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Panutan dan junjungan mutlak seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016**”.

Skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi melengkapi apa yang kurang dalam penelitian ini, semoga penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademik FE UII, khususnya bagi penulis dan mahasiswa Ilmu Ekonomi FE UII.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, Oktober 2018

Naufal Fikri Maulana



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1. Kajian Pustaka.....	10
2.2. Deskripsi Penelitian .....	16
2.3. Landasan Teori .....	16
2.3.1. Tenaga Kerja.....	16
2.3.1.1. Permintaan Tenaga Kerja .....	17
2.3.1.2. Penawaran Tenaga Kerja .....	19
2.3.1.3. Keseimbangan Tenaga Kerja.....	20
2.3.2. Upah Minimum.....	21
2.3.3. Produk Domestik Regional Bruto.....	23
2.3.4. Investasi .....	25
2.3.5. Tingkat Pendidikan.....	26

2.4 Kerangka Pemikiran.....	27
2.5. Hipotesis Penelitian.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	30
3.2. Definisi Operasional Variabel .....	30
3.3. Metode Analisis.....	31
3.3.1. Pendekatan Model Regresi Data Panel.....	31
3.3.2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	34
3.3.2.1. Uji Chow.....	34
3.3.2.2. Uji Hausman .....	35
3.3.3. Uji Hipotesis.....	36
3.3.3.1. Koefisien Diterminasi ( $R^2$ ).....	36
3.3.3.2. Uji T.....	36
3.3.3.3. Uji F.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
4.1. Analisis Deskripsi Data .....	38
4.2. Hasil Uji F-statistik ( <i>Chow Test</i> ).....	43
4.3. Hasil Uji Hausman .....	44
4.4 Uji Hipotesis.....	45
4.4.1. $R^2$ .....	46
4.4.2. Uji F .....	46
4.4.3. Uji T.....	47
4.5. Interpretasi Penelitian .....	49
4.5.1. UMK .....	50
4.5.2. Investasi PMA.....	51
4.5.3. Tingkat Pendidikan.....	52
4.5.4. PDRB .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



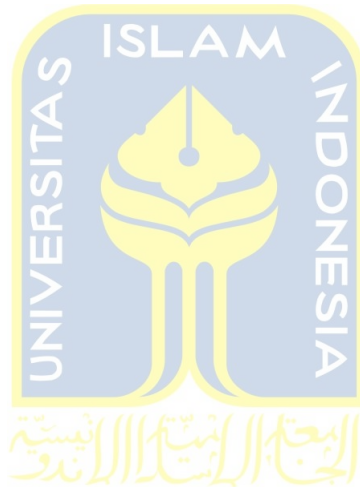
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2014-2016.....	1
Tabel 1.2. Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat 2012-2015 .....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Terkait Penyerapan Tenaga Kerja .....	13
Tabel 4.1. Hasil Regresi <i>Common Effect</i> .....	39
Tabel 4.2. Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> .....	40
Tabel 4.3. Hasil Estimasi <i>Random Effect</i> .....	41
Tabel 4.4. Hasil Uji <i>Chow Test</i> .....	43
Tabel 4.5. Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	44
Tabel 4.6. Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> .....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka (Agustus) (Jiwa) .....	4
Gambar 2.1. Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang ..	18
Gambar 2.2. Fungsi Penawaran Tenaga Kerja.....	20
Gambar 2.3. Keseimbangan Tenaga Kerja .....	21
Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran.....	28

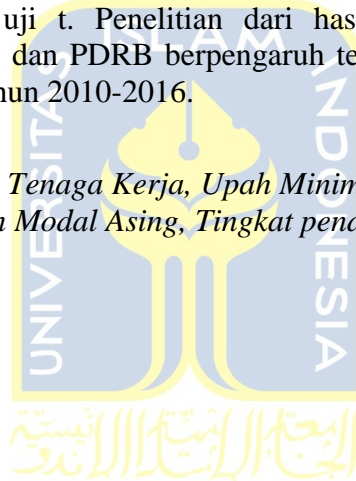


## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2010-2016) dengan variabel dependen yaitu Jumlah Tenaga Kerja dan variabel independen yang digunakan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Investasi Asing (PMA), Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Investasi Asing (PMA), Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat Tahun 2010-2016.

Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan sampel 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, lalu memilih terlebih dahulu metode mana yang akurat antara model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan menguji metode uji *chow* dan uji *hausman* dan juga uji statistik melalui uji determinasi, uji *f* dan uji *t*. Penelitian dari hasil analisis data bahwa Tingkat Pendidikan, UMK, PMA dan PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016.

Kata Kunci : *Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Penanaman Modal Asing, Tingkat pendidikan, PDRB, Jawa Barat.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki permasalahan-permasalahan yang sama seperti Negara berkembang pada umumnya yaitu mengenai ketenagakerjaan. Meningkatnya jumlah angka angkatan kerja yang cukup pesat membuat permasalahan ketenagakerjaan menjadi semakin tidak bisa di kesampingkan, pada Agustus 2014 BPS mencatat angkatan kerja di Indonesia mencapai 121,87 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,41%. Pemerintah dalam upayanya mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut melakukan perbaikan sistem upah melalui kebijakan upah minimum, tidak terkecuali juga di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1.1**  
**Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2014-2016**

Tahun	Upah Minimum (Rp)
2014	1.000.000
2015	1.150.000
2016	1.250.000

*Sumber: BPS, Jawa Barat*

Dari Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa UMK Jawa Barat selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya, namun ini harus terus diperhatikan oleh pemerintah. Peralnya kenaikan upah dapat juga mengakibatkan bertambahnya pengangguran apabila perusahaan tidak mampu menunaikan kebijakan UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, seperti memberhentikan tenaga kerja secara terpaksa.

Penetapan UMK tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan telah disesuaikan dengan kondisi nyata ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Penyerapan tenaga kerja juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, itu juga menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pemerintah memiliki sumber pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemerintah itu sendiri. Pengeluaran belanja pemerintah juga dapat menjadi sebuah alat intervensi yang dapat mempengaruhi roda perekonomian melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tak lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Keuangan daerah ditunjukkan melalui susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 16 Tentang Penyusunan dan Penetapan APBD menjelaskan bahwa “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”. Pertumbuhan penduduk yang dapat menjadi manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga perlu menjadi tenaga kerja yang berkualitas agar mampu bersaing di era globalisasi seperti ini. Karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki sumber daya manusia yang memadai, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya dengan cara mendistribusikan alokasi belanja daerah yang tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana umum, maka hal itu cenderung dapat meningkatkan Pendapatan Asli



Daerah Provinsi Jawa Barat. Sasaran yang tepat adalah memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur yang baik tentunya akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Barat. Karena semakin tinggi tingkat Investasi, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat pula secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran. Tercatat pada Triwulan III 2015 disesuaikan dengan minat dan tujuan investor di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah investasi Rp 129.522.397.150.000 dengan jumlah proyek sebanyak 1.044 proyek.

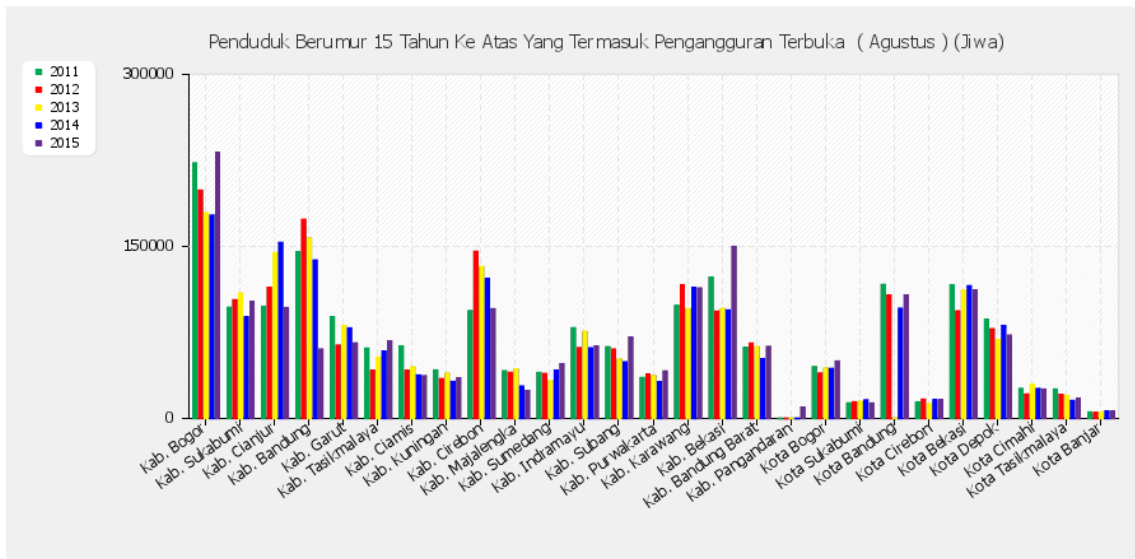
Hal lain yang dapat menjadi perhatian selain upah minimum yaitu produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Feriyanto (2014) "Faktor PDRB adalah merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi".

Perlambatan pada pertumbuhan PDRB dapat menyebabkan perlambatan penyertapan tenaga kerja. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa PDRB berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yaitu apabila PDRB meningkat 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak

1,23% (Budi Utami, 2009), sehingga PDRB menjadi salah satu variable yang dirasa mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan tentang kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat tentu berdampak pada angka pengangguran, terlebih apabila perusahaan yang melakukan *open recruitment* sangat selektif dalam mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan.

**Gambar 1.1**



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi

Pada gambar 1.1 di atas memperlihatkan pola yang berbeda tentang angka pengangguran di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, hal ini juga sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di setiap daerahnya. Rata-rata di setiap daerah dilihat melalui table di atas, terjadi kenaikan persentase angka pengangguran terbuka di tahun 2015, seperti data pada Kabupaten Bogor angka pengangguran terbuka pada tahun 2015 mencapai 23.526 jiwa.

Fakto yang menjadi penghambat penyerapan tenaga kerja itu seperti permintaan institusi atau perusahaan terhadap tenaga kerja tidak adanya kesesuaian. Penduduk yang tercatat sebagai angkatan kerja harus memiliki kemampuan yang mumpuni, hal tersebut dapat terjadi karena tingkat pendidikan menjadi salah satu dasar ukuran perusahaan dalam menyeleksi tenaga kerja yang akan di pekerjakan. Karena dengan tingginya tingkat pendidikan maka akan berbanding lurus dengan kemampuannya dalam bekerja. Pendidikan juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta mampu membentuk pola pikir, karakter serta cara bertindak yang modern sangat di perlukan di jaman globalisasi saat ini. namun terkadang hal ini tidak seirama dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tidak sedikit dari masyarakat yang telah mengenyam Pendidikan tinggi namun belum bisa mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya penyerapan tenaga kerja yang juga akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan.

**Tabel 1.2**

**Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015**

Tahun	Pengangguran Terbuka (jiwa)
2012	1.828.986
2013	1.870.649
2014	1.772.196
2015	1.794.184

Sumber :BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 menjelaskan keadaan pengangguran Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai 2013 sebesar 41.663 jiwa kemudian sempat menurun lalu kemudian kembali naik ditahun 2015. Dari data tersebut menunjukkan perlunya sebuah kebijakan agar dapat meningkatkan kesempatan

kerja dan mengurangi pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Pengangguran dapat ditekan dengan cara meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka orang yang bekerja akan lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya penelitian untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Dan kemungkinan-kemungkinan yang dirasa dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Jawa barat di pilih sebagai objek penelitian selain karena penulis berasal dari Jawa Barat yaitu karena Jawa Barata merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan Ketenagakerjaan menjadi salah satu permasalahan yang terasa bagi penduduk Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka harus dilakukan penelitian **“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2010-2016)”** untuk mengetahui factor yang dapat mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016?
2. Bagaimanakah pengaruh investasi PMA terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016?

4. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian:**

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh investasi PMA terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016

#### **Manfaat Penelitian:**

1. Bagi penulis, manfaat yang di dapat adalah mampu mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah di pelajari selama duduk di bangku perkuliahan dan juga dalam rangka menyelesaikan syarat ke lulusan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Islam Indonesia
2. Bagi pemerintah, manfaat yang di peroleh adalah penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberi kebijakan

tentang penyerapan tenaga kerja yang itu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dengan masing-masing penjelasannya.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI**

###### **1. Kajian Pustaka**

Bagian ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama agar dapat menjadi acuan dalam penelitian.

###### **2. Landasan Teori**

Bagian ini membahas tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori merupakan cara peneliti menteorikan hubungan antar variabel dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

###### **3. Hipotesis**

Bagian ini merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah disesuaikan dengan penelitian terdahulu dan teori, sehingga hipotesis yang disusun merupakan pernyataan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah

### BAB III METODE PENELITIAN

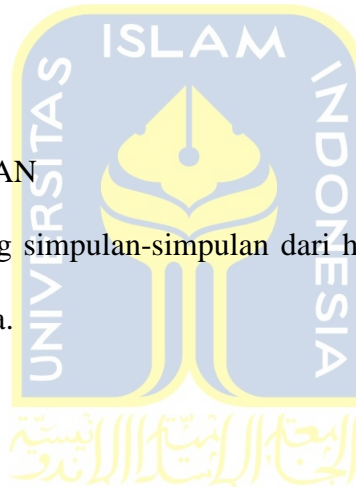
Bab ini menguraikan tentang jenis dan cara pengumpulan data yang diperlukan, definisi operasional variabel, serta metode analisi yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan deskripsi data penelitian, pembahasan, serta penjelasan dari hasil analisis.

### BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan-simpulan dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Putra (2012) menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai R square menunjukkan bahwa pengaruh nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebesar 77,7 % sedangkan 22,3% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Ahmad Yani (2011), dalam skripsinya mengenai pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di sulawesi selatan periode 200-2009 dengan model regresi liner berganda menunjukkan hasil positif

Sarsi dkk (2014) menyatakan bahwa tingkat upah, PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Riau. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat. Faktor yang paling



dominan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah tingkat upah.

Sandika dkk (2014) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan tahun 2003-2012. Nilai R Square penelitian tersebut menunjukkan bahwa investasi hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil yakni sebesar 9,8% maka dipastikan bahwa terdapat faktor lain yang lebih baik mempengaruhi penyerapan kerja di Kabupaten Pelalawan.

Wijaya dkk (2014) menyatakan bahwa variabel rata-rata Lama Sekolah yang memiliki dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan variabel Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Nilai R square menunjukkan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 82,9% sedangkan sisanya 17,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut.

Pangastuti (2015) menyatakan bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif. Sedangkan nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP), serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Pengangguran.

Purnami (2015) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015” menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan dan upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 – 2013.

Danawati dkk (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian Apri Cahyono (2015), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2013” menunjukkan Secara serempak upah minimum, produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di karesidenan Surakarta tahun 2006- 2013.

Takyudin (2016) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 10 usaha percetakan foto copy menjadi sampel yang ada di Kota Kendari mampu menyerap

sebanyak 70 orang tenaga kerja, namun upah yang ditawarkan oleh usaha percetakan foto copy masih sangat jauh dari standar upah minimum regional Kota Kendari pada tahun 2015 pemerintah Kota Kendari melalui dewan pengupahan menetapkan upah minimum kota sebesar Rp 1.800.000 atau naik sekitar 12% dari UMK sebelumnya.

Rofiqoh (2014) dalam penelitiannya mengenai faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di kabupaten jember tahun 2006-2011 mendapatkan hasil penelitian berupa. nilai investasi, jumlah unit usaha dan PDRB secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Yang artinya bisa disimpulkan nilai investasi, jumlah unit usaha dan PDRB secara positif mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember tahun 2006-2012.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu Terkait Penyerapan Tenaga Kerja**

No	Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Putra	2012	Pengaruh antara Nilai Investasi, Nilai Upah dan Nilai Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Nilai investasi, nilai upah, nilai produksi dan penyerapan tenaga kerja	Ada pengaruh positif nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
2	Sarsi, dkk	2014	Pengaruh Tingkat Upah dan PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Riau	Tingkat upah, PDRB dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Riau. Sedangkan PDRB memiliki hasil positif

					dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau
3	Sandika, dkk	2014	Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Pelalawan	Investasi dan kesempatan kerja	Investasi hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil yakni sebesar 9,8% sehingga dipastikan bahwa terdapat faktor lain yang lebih baik mempengaruhi penyerapan kerja di Kabupaten Pelalawan
4	Wijaya, dkk	2014	Pengaruh Lama Sekolah, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat	Lama sekolah, penanaman modal asing, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja	Variabel independen mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 82,9% sedangkan sisanya 17,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut
5	Pangastuti	2015	Pengaruh PDRB, UMK, PAD, dan Pengangguran terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	PDRB, UMK, PAD, pengangguran dan penyerapan tenaga kerja	Ada pengaruh negatif antara PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, UMK, pengangguran dan PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP), serta

					Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan, yaitu Pengangguran.
6	Danawati, dkk	2016	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kesempatan Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan	Pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.
7	Apri Cahyono	2015	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2013	Penyerapan Tenaga Kerja	Secara serempak upah minimum, produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di karesidenan Surakarta tahun 2006-2013

8	Takyudin	2016	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Percetakan Foto Copy di Kota Kendari	Penyerapan Tenaga Kerja	10 unit usaha percetakan foto copy yang menjadi sampel penelitian mampu menyerap tenaga kerja berkisar antara 6-12 tenaga kerja. Ttingkat upah usaha percetakan foto copy di Kota Kendari ditentukan oleh pemilik perusahaan percetakan foto copy sehingga dalam pemberian upah tidak mengikuti standar pengupahan yang ditetapkan pemerintah
9	Rofiqoh	2014	Faktor yang Mempengaruhi Peyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Kecil di Kabupaten Jember Tahun 2006-2011	Penyerapan Tenaga Kerja	Nilai investasi, jumlah unit usaha dan PDRB secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja

## 2.2. Deskripsi Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini adalah Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016. Permasalahan yang timbul sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya dalam rumusan masalah dirasa harus diketahui secara konfrehensif dengan dilakukannya penelitian secara mendalam, Jawa Barat sebagai provisi dengan jumlah penduduk terbanyak pertama di Indonesia memiliki beragam permasalahan yang salah satunya mengenai penyerapan tenaga kerja. Adapaun yang

menjadi variable dalam penelitian ini adalah Angka penduduk Jawa Barat yang bekerja sebagai variable tetap, lalu Upah minimum kabupateb/kota, Investasi asing, Tingkat pendidikan dan PDRB sebagai variable tidak tetap atau variable yang memperngaruh variable tetap.

## **2.3. Landasan Teori**

### **2.3.1. Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau unit usaha tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam unit usaha. Daya serap tenaga kerja merupakan suatu model permintaan suatu unit usaha terhadap tenaga kerja dalam pasar kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku. Tingkat upah yang berlaku juga mempengaruhi kekuatan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja dari pasar. Kekuatan terhadap permintaan tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal dari usaha tersebut. Semakin sempit daya serap sektor modern terhadap perluasan kesempatan kerja telah menyebabkan sektor tradisional menjadi tempat penampungan angkatan kerja. Lapangan kerja terbesar yang dimiliki Indonesia berada pada sektor informal. Hal ini disebabkan sektor informal mudah dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal, kepandaian dan keterampilan.

### 2.3.1.1. Permintaan Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja, dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan sama seperti pasar lainnya. Namun pasar tenaga kerja berbeda dengan sebagian pasar lainnya. Hal ini dikarenakan permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan. Sebagian besar jasa tenaga kerja, bila dibandingkan dengan barang-barang jadi yang siap dinikmati oleh konsumen merupakan input untuk memproduksi barang-barang lainnya. Perusahaan kompetitif yang memaksimalkan pekerja menyewa pekerja sampai titik dimana nilai produk marginal tenaga kerja setara dengan upah (Mankiw, 2014).

Permintaan tenaga kerja dapat dijelaskan dengan permintaan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan permintaan tenaga kerja jangka pendek mengasumsikan bahwa proses produksi perusahaan dalam kondisi penggunaan modal yang tetap, sedangkan faktor input lainnya yaitu tenaga kerja bersifat variabel (Feriyanto, 2014). Untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja yang diminta digunakan skedul VMPP (*Value Marginal Physical Product*) atau nilai produk fisik marginal. VMPP menjadi penentu nilai harga maksimum yang dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Nilai VMPP didapatkan dengan mengalikan MPP (*Marginal Physical Product*) dengan  $p$  atau tingkat harga  $VMPP = MPP \times P$  (Bellante, 1990).

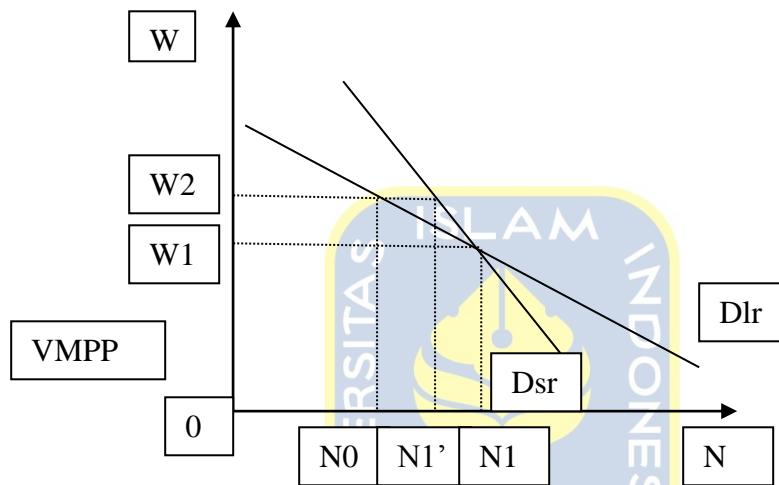
Permintaan tenaga kerja jangka panjang akan cenderung dapat menggantikan penggunaan faktor input yang relatif lebih murah. Hal tersebut terjadi karena sifat fleksibilitas yang tinggi dari perusahaan untuk bereaksi atau lebih responsif terhadap



perubahan suatu biaya faktor input. Maka dalam jangka panjang jika upah tenaga kerja dinaikkan akan menyebabkan pengurangan yang lebih besar jika dibandingkan dari jangka pendek (Feriyanto, 2014)

**Gambar 2.1**

**Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

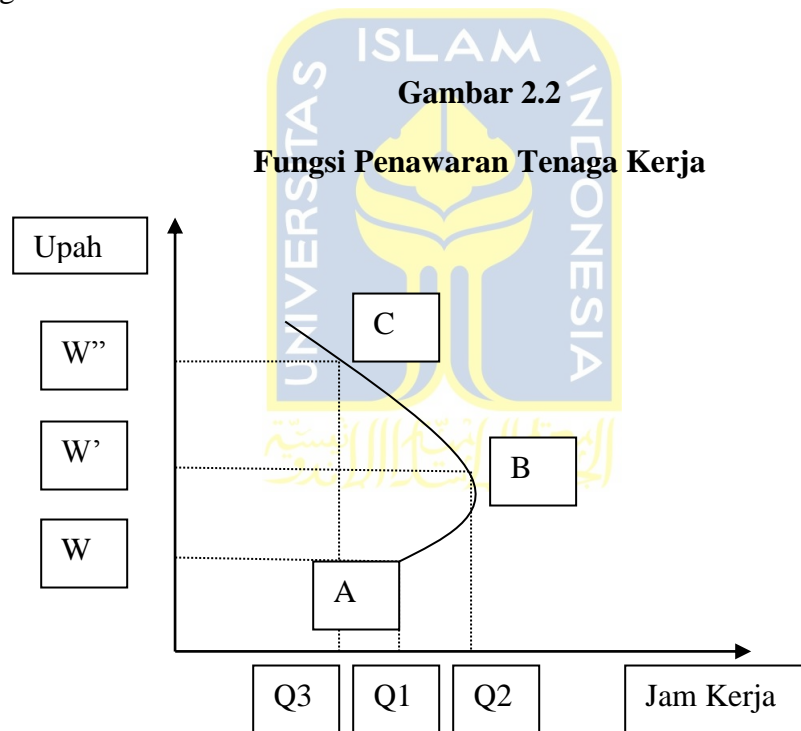


Sumber: Ballante (1990)

Gambar 2.1 menjelaskan hubungan tingkat upah dengan permintaan tenaga kerja. Ketika terjadi kenaikan upah dari  $W_1$  ke  $W_2$  maka dalam jangka pendek, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan dari  $N_1$  ke  $N_1'$ . Melalui permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang ( $D_{lr}$ ) reaksi lebih responsif dengan mengurangi tenaga kerja dari  $N_1$  menjadi  $N_0$ . Penurunan jumlah tenaga kerja tersebut disebabkan perusahaan melakukan penyesuaian modal akan menggantikan tenaga kerja hingga terjadi penurunan tenaga kerja dari titik  $N_1$  menjadi  $N_0$ .

### 2.3.1.2. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja dengan kondisi upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja merupakan suatu hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakan (Ballante, 1990). Upah akan sangat mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Hal ini disebabkan ketika upah yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan tinggi, maka tenaga kerja mengalami peningkatan.



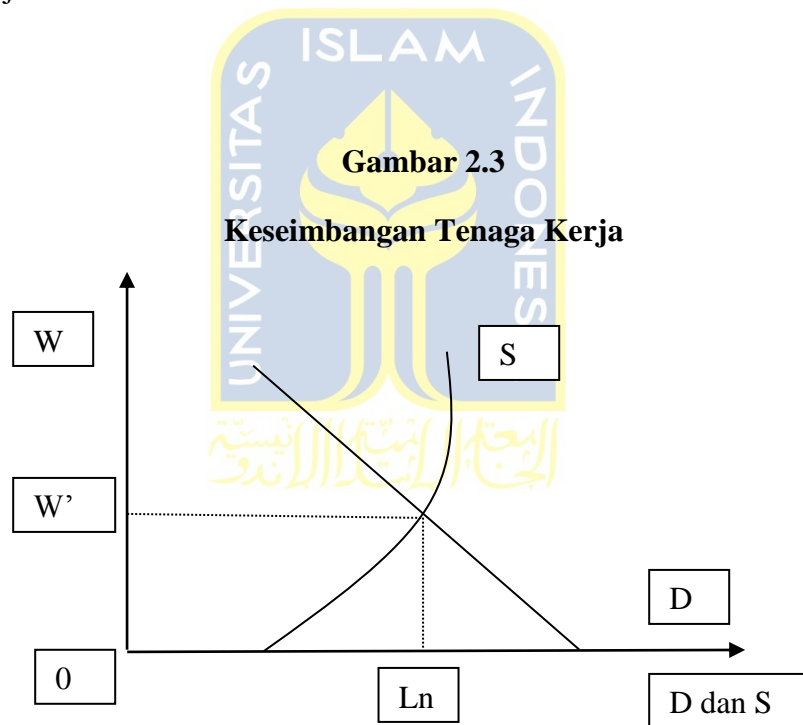
Sumber: Ballante (1990)

Gambar 2.2 menjelaskan ketika upah berada dititik  $W$  menunjukkan jumlah tenaga kerja berada dititik  $Q1$ . Saat upah dinaikkan lebih tinggi menjadi  $W'$  maka jumlah tenaga kerja akan mengalami kenaikan menjadi  $Q2$ . Akan tetapi jika upah

semakin dinaikkan menjadi  $W''$  jumlah tenaga kerja justru akan mengalami penurunan.

### 2.3.1.3. Keseimbangan Tenaga Kerja

Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja bertemu pada satu titik equilibrium atau keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan tersebut ketika pada tingkat upah tertentu pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan dan pada upah tersebut pengusaha memperkerjakan tenaga kerja tersebut.



Sumber: Simanjuntak (2001)

Gambar 2.3 menjelaskan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dimana perpotongan titik  $S$  dan  $D$  bertemu pada satu titik dengan tingkat upah di  $W'$  dan jumlah tenaga kerja berada di  $L_n$ .

### 2.3.2. Upah Minimum

Upah menjadi hal yang menentukan dalam pasar tenaga kerja. Upah merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja atas jasa yang telah dilakukannya. Secara teoritis, apabila tingkat upah tinggi, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya saat tingkat upah rendah maka penawaran tenaga kerja akan turun (Simanjuntak, 2001). Mankiw menyatakan dua fakta bagaimana upah ditentukan dalam pasar tenaga kerja kompetitif: 1) upah menyesuaikan keseimbangan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja. 2) upah setara dengan nilai produk marjinal tenaga kerja. Sumarsono (2009) menjelaskan pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Perusahaan akan meminta lebih banyak tenaga kerja jika nilai produk marjinal yang dihasilkan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja melebihi biayanya. Tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja adalah:

$$W = WMPPL = MPPL \times P$$

Keterangan:

W = tingkat upah

P = harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang

WMPPL = pertambahan hasil marginal pekerja, diukur dalam unit barang per unit waktu

MPPL = nilai pertambahan hasil marginal pekerja.

Penentuan tingkat upah diatas menerangkan bahwa upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut disesuaikan atas hasil yang dikerjakannya. Hal tersebut

dipertegas David Ricardo dalam teori upah wajar (alami) yang menyatakan bahwa perbaikan upah hanya ditentukan oleh perbuatan dan perilaku tenaga kerja sendiri dan pembentukan upah sebaliknya diserahkan kepada persaingan bebas di pasar. Sehingga teori upah alami ini menjelaskan harga atas upah tenaga kerja adalah cukup untuk sekedar pemeliharaan tenaga kerja dan keluarganya untuk bertahan hidup.

Pemerintah membuat kebijakan tentang upah agar dapat melindungi kehidupan tenaga kerja dengan menentukan batas upah minimum yang diterima oleh pekerja. Upah minimum adalah batas upah terendah yang diterima oleh pekerja. Upah minimum ditetapkan oleh kepala daerah yaitu Gubernur untuk wilayah tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk wilayah tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Untuk dapat menentukan besaran penetapan upah minimum pemerintah membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan terkait upah minimum yaitu Permenkertas No. 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum *juncto*. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun (Feriyanto, 2014).

### **2.3.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004;8) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Sedangkan menurut departemen statistik ekonomi dan moneter Bank Indoneisia, PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan. “(1) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, (2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar”. Secara konseptual penghitungan PDRB menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, adapun penjelasannya ialah:

#### 1. Pendekatan produksi

Dalam pendekatan produksi PDRB adalah “jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu”. Unit-unit produksi dalam pendekatan ini tergolong menjadi sembilan sektor usaha. (1) peternakan, pertanian, kehutanan dan perikanan. (2) pertambangan dan penggalan. (3) industri olahan. (4) listrik, gas dan air bersih. (5) konstruksi. (6) perdagangan, hotel dan restoran. (7) pengangkutan dan komunikasi. (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan. (9) jasa-jasa (termasuk juga jasa pemerintah)

#### 2. Pendekatan Pengeluaran

Dalam pendekatan pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari; (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga. (2) konsumsi pemerintah. (3) pembentukan modal domestik bruto. (4) perubahan inventori. (5) ekspor neto.

### 3. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan PDRB adalah jumlah batas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini batas jasa yang dimaksudkan adalah; upah atau gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Hal ini sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya dalam definisi ini.

#### **2.3.4. Investasi**

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2012).

Mankiw menjelaskan bahwa investasi menjadi awal kegiatan pembangunan ekonomi yang dapat dijalankan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara swasta dan pemerintah. Investasi menjadi cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan dalam jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakat.

Investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan pada masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Investasi adalah jumlah peralatan, modal, persediaan, bangunan atau struktur. Persediaan salah satu tujuan PDB adalah untuk mengukur nilai produksi ekonomi dan barang yang ditambahkan ke dalam persediaan merupakan bagian dari produksi pada periode tersebut.

Ada dua jenis investasi yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMD). Seluruhnya di atur berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 5 dan 6 Tentang Penanaman Modal:

1. Penanam Modal Asing (PMA) adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

### **2.3.5. Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan menurut Suhardjo (2007) “Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap



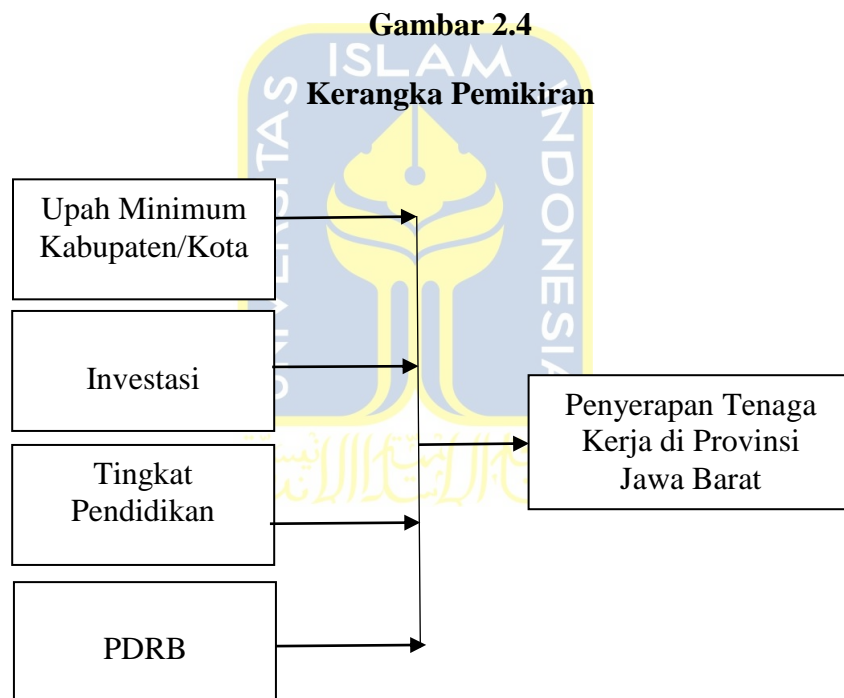
informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.”

Kualitas penduduk yang rendah akan menciptakan permasalahan pembangunan ekonomi bagi suatu daerah. Hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi sendiri banyak dipengaruhi oleh hubungan manusia dengan faktor produksi yang lain. Tidak semua penduduk yang bertindak sebagai faktor produksi yang dapat mengolah faktor produksi lainnya. Melainkan penduduk yang sebagai tenaga kerja yang dapat dikatakan sebagai faktor produksi.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan keharusan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan berdaya saing. Todaro (2011) Pendidikan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka semakin baik suatu daerah mengolah faktor produksi lainnya. Dengan pendidikan penduduk akan dapat membuat dan memanfaatkan sebuah teknologi modern untuk mengolah faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa agar memperoleh penghasilan. Peningkatan kualitas sumberdaya saat ini tercermin melalui banyaknya penduduk tamatan perguruan tinggi. Tamatan perguruan tinggi dianggap mempunyai kualitas yang baik dengan tawaran bidangnya masing-masing.

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Penyerapan tenaga kerja tidak akan meningkat jika pemerintah menyampingkan hal-hal yang dapat mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun tidak bisa dipastikan bahwa semua variabel dapat berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, karena sebagai perusahaan perlu memperhatikan aspek lain.

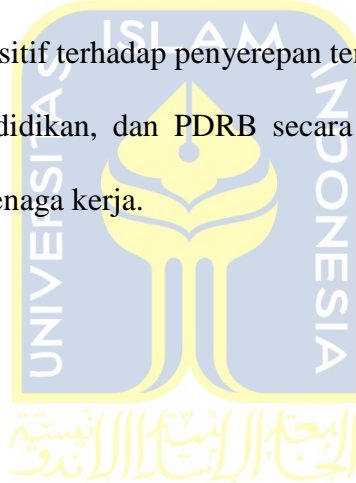


Kerangka pemikiran di atas menjelaskan faktor-faktor yang akan dikaji agar dapat memastikan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Agar dapat menjelaskan apakah UMK, PDRB, investasi, dan tingkat pendidikan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

## 2.4. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang diberikan guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Maka rumusan hipotesis yang akan saya bawa dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Upah minimum kota/kabupaten berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja
2. Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
5. Investasi, tingkat pendidikan, dan PDRB secara bersamaan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan data yang nantinya akan digunakan oleh penulis untuk dapat memperoleh hasil. Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur dan informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet seperti Badan Pusat Statistik, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan topik mengenai data penyerapan tenaga kerja, UMK, investasi, tingkat pendidikan dan PDRB di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016.

#### **3.2. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel adalah sesuatu yang nilainya berbeda atau dapat berubah. Dalam penelitian yang bersifat kuantitatif variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independent*) sebagai batasan dalam sebuah penelitian. Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja adalah data jmlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Jawa Barat dalam satuan jiwa sebagai variabel *dependent* atau variabel bebas.

2. Upah Minimum menggunakan data nilai upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam satuan mata uang Rupiah (Rp). Sebagai variabel *Independent* atau variabel terikat.
3. Investasi menggunakan data jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam satuan mata uang Rupiah (Rp). Sebagai variabel *Independent* atau variabel terikat.
4. Tingkat pendidikan menggunakan data jumlah angkatan kerja lulusan universitas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam satuan jiwa. Sebagai variabel *Independent* atau variabel terikat.
5. PDRB adalah data perkapita menurut harga berlaku di Jawa Barat dalam satuan Rupiah (Rp). Sebagai variabel *Independent* atau variabel terikat.

### 3.3. Metode Analisis

Model ekonometri digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui hubungan timbal-balik antara formulasi teori, pengujian, dan estimasi empiris. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan model data panel yakni menggabungkan data runtuwaktu (*Time series*) dan data silang (*Cross Section*). Agus Widarjono (2016) menjelaskan bahwa penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan

variabel (omitted-variabel). Model Regresi dalam bentuk log linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Log}Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X1_{it} + \beta_2 \text{Log}X2_{it} + \beta_3 \text{Log}X3_{it} + \beta_4 \text{Log}X4_{it} + U$$

Keterangan:

Y = Tenaga kerja

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien

X1 = Upah minimum kota/kabupaten (Rp)

X2 = Investasi (Rp)

X3 = Tingkat Pendidikan(jiwa)

X4 = PDRB (Rp)

i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

u = Error term

metode akan disesuaikan dengan data yang tersedia dan reliabilitas antara variabel dalam penelitian. Langkah yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi adalah melakukan pengujian estimasi model terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh estimasi model yang paling tepat digunakan untuk jenis data panel.

### 3.3.1. Pendekatan Model Regresi Data Panel

Sriyana (2014) menjelaskan estimasi model dalam data panel melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*, penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. *Common Effects*

Model *common effects* merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini menggabungkan antara data *time series* dan *cross section* dalam bentuk pool, kemudian diregresi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Persamaan model ekonomi yang akan dianalisis dengan dua variabel bebas berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + u$$

Persamaan diatas menjelaskan variabel Y milik unit i pada periode t dipengaruhi oleh masing-masing variabel X1, X2, dan X3 pada masing-masing unit i dan periode t. Metode *common effects* ini mengesampingkan faktor unit dan faktor periode waktu, maka kedua faktor tersebut dapat ditiadakan.

## 2. Fixed Effects

Model Fixed effects adalah model yang mengasumsikan hasil penelitian bahwa terdapat efek yang tidak sama antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepanya. Oleh karena itu, dalam model fixed effects, setiap variable merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy untuk mengetahui perbedaan satu objek dengan objek lainnya. Model ini dapat diregresi dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Persamaan model ekonomi yang akan dianalisis dengan empat variabel bebas dan lima objek (unit):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1it} + \beta_6 D_{2it} + \beta_7 D_{3it} + \beta_8 D_{4it} + \beta_9 D_{5it} + e_{it}$$

## 3. Random Effects

Selain dengan model *common effect* dan *fixed effects*, terdapat satu model lag yang data digunakan dalam regress data panel yakni *random effects*. *Random effects* merupakan alternative yang data digunakan geek *fixed effects* tidal tepat. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Menganalisis dengan metode *random effects* ini terdapat sau syarat, yakni objek data cross section harus lebih besar dari pada banyaknya koefesien. Jika asumsi dilanggar maka koefesien *random effects* tidak dapat diestimasi atau akan menghasilkan angka nol.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

### 3.3.2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dari ketiga model tersebut maka perlu di lakukan uji guna menentukan model estimasi yang paling tepat. Analisis di lakukan dengan menggunakan data yang telah terkumpul sesuai dengan sumber data yang ada kemudian dilakukan menggunakan aplikasi *evIEWS 9*.

#### 3.3.2.1. Uji Chow

Pemilihan antara model *common effects* atau *fixed effects* data dipahami seperti bagaimana melakukan uji signifikan *fixed effects* yang digunakan untuk memutuskan apakah model dengan asumsi *slope* dan intersep tetap antar individu dan antar waktu (*common effects*), ataukah diperlukan penambahan variabel *dummy* untuk mengetahui perbedaan intersep (*fixed effects*) dilakukan dengan uji F dan melihat nilai *residual sum of squares* (RSS) dari kedua model regresi tersebut (Sriyana, 2014) Hipotesis yang dibentuk adalah:



$H_0$  : *Common Effects*

$H_1$  : *Fixed Effects*

Adapun uji statistiknya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2) / i - 1}{(RSS2) / (it - t - k)}$$

Dimana:

RSS1 dan RSS2 : *residual sum of squares* tanpa *dummy* dan dengan *dummy*

i : unit

t : jumlah periode waktu

k : parameter dalam model *fixed effects*

Ketika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka menolak hipotesis  $H_0$ .

Sehingga menunjukkan bahwa regresi data panel dengan metode *fixed effects* adalah model yang lebih baik dari model regresi data panel *common effects*.

### 3.3.2.2. Uji Hausman

Uji pemilihan model antara *fixed effects* dan *random effects* dilakukan dengan uji Hausman yang merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik diantara model LSDV pada pendekatan *fixed effects* dan GLS pada pendekatan *random effects*. Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut

$H_0$  : *Random Effects*

$H_1$  : *Fixed Effects*

$$m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Statistik uji Hausmen mengikuti mengikuti distribusi statistij *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak jumlah variabel independen (p). Hipotesis diterima jika nilai statistik Hausmen lebih besar dari nilai *chi-square* atau dengan kata lain *p-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa model *random effects* lebih baik digunakan dalam regresi data panel daripada model *fixed effect*.

### 3.3.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penulisan ini adalah koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan uji koefisien Regresi Parsial (uji t).

#### 3.3.3.1. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R Square adalah koefisien yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu model. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2004). Apabila nilai R<sup>2</sup> mendekati 1 maka ada hubunga yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan.

#### 3.3.3.2. Uji F ( Uji Hipotesis Koefisien Secara Menyeluruh)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya antar variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama). Uji F ini menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

- a.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

- b. Menentukan besarnya nilai F hitung dan Signifikansi F (Sig-F)
- c. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yaitu sebesar 5%.
- d. Kriteria pengujian
  - Jika nilai sig-F  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara serentak tidak memenuhi variabel terikat secara signifikan.
  - Jika nilai sig-F  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas secara serentak memenuhi variabel terikat secara signifikan.
  - Uji Statistik - Koefisien Determinasi

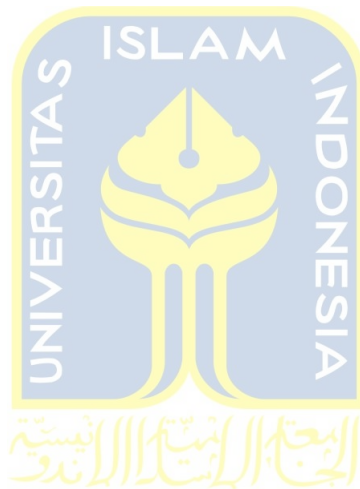
### 3.3.3.3. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya antara variabel independen dan variabel dependen secara individu. Hipotesis uji T adalah sebagai berikut:

- a. Jika hipotesis signifikan positif
  - $H_0 : \beta_i = 0$
  - $H_1 : \beta_i > 0$
- b. Jika hipotesis signifikan negatif
  - $H_0 : \beta_i = 0$
  - $H_1 : \beta_i < 0$
- c. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yaitu sebesar 1%, 5%, 10%.

d. Kriteria pengujian

- Jika nilai probabilitas T-statistic  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
- Jika nilai probabilitas T-statistic  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### 4.1 Analisis Deskriptif Data

Dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan model data panel periode 2010-2016.. Teknik penaksiran dengan menggunakan panel data memungkinkan untuk dilakukan penggabungan antara data *time series* dan *cross section*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Upah Minum Kabupaten/kota (UMK)

Data upah minimum Kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016.

Upah minimum di jadikan bagian dari variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penyerapan tenagakerja di jawa barat dari sektor Upah.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Data PMA menggunakan data PMA Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2010-2016 dengan satuan rupiah. Investasi asing di jadikan bagian variabel untuk mengetahui pengaruhnya dalam penyerapan tenagakerja di jawa barat dari sektot investasi.

3. Tingkat Pendidikan

Data Tingkat pendidikan menggunakan data jumlah orang yang bekerja dengan tingkat pendidikan Sarjana. Tingkat pendidikan di jadikan bagian variabel untuk mengetahui pengaruhnya dalam penyerapan tenagakerja di jawa barat dari sektot Pendidikan

#### 4. PDRB perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk kota, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan total suatu kota dibagi dengan jumlah penduduk kota tersebut. Biasanya pendapatn perkapita sering disebut dengan PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita.

**Tabel 4.1**

**Hasil Regresi *Common Effect***

Dependent Variable: Y?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/12/17 Time: 01:23  
 Sample: 2010 2016  
 Included observations: 7  
 Cross-sections included: 27  
 Total pool (unbalanced) observations: 185

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	500508.2	79066.23	6.330240	0.0000
X1?	-0.084988	0.083738	-1.014924	0.3115
X2?	-1.33E-09	7.12E-09	-0.186334	0.8524
X3?	7.911707	0.926941	8.535284	0.0000
X4?	5286.908	3370.586	1.568542	0.1185
R-squared	0.440507	Mean dependent var		837821.9
Adjusted R-squared	0.428074	S.D. dependent var		536718.9
S.E. of regression	405897.9	Akaike info criterion		28.69225
Sum squared resid	2.97E+13	Schwarz criterion		28.77928
Log likelihood	-2649.033	Hannan-Quinn criter.		28.72752
F-statistic	35.43000	Durbin-Watson stat		0.239315
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil regresi panel data dengan model common effect, diperoleh sebagai berikut

:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{it} + \beta_2 \ln X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 \ln X_{it} + e_{it}$$

$$\ln Y_{it} = 500508.2 + -0.084988 \ln X_1 + -1.33E-09 \ln X_2 + 7.911707 \ln X_3 + 5286.908 \ln X_4 +$$

$e_{it}$

$R^2 = 0.440507$  N=38 F-stat = 35.43000

**Tabel 4.2**

**Hasil Estimasi *fixed effect***

Dependent Variable: Y?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/12/17 Time: 01:24  
 Sample: 2010 2016  
 Included observations: 7  
 Cross-sections included: 27  
 Total pool (unbalanced) observations: 185

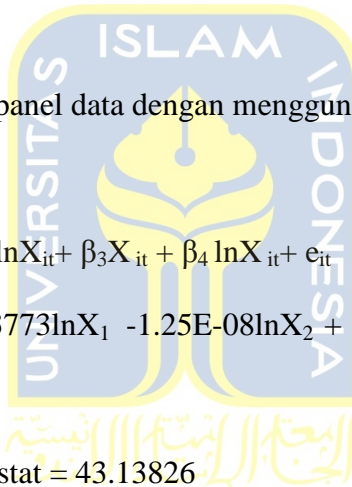
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	661848.6	73416.73	9.014957	0.0000
X1?	-0.103773	0.046090	-2.251512	0.0258
X2?	-1.25E-08	4.15E-09	-3.006170	0.0031
X3?	4.940042	0.631645	7.820915	0.0000
X4?	6374.042	3865.952	1.648764	0.1012
Fixed Effects (Cross)				
_KRW--C	72629.80			
_BKS--C	82869.37			
_PWK--C	54132.41			
_BGR--C	969063.5			
_BDG--C	445766.3			
_BBRT--C	-142087.8			
_CRB--C	18101.68			
_MJK--C	-166188.1			
_KNG--C	-326733.9			
_IDMY--C	-258640.6			
_SBG--C	-35799.81			
_SKBM--C	223394.2			
_CJR--C	-48907.19			
_CMS--C	-176338.0			
_TSK--C	-21289.08			
_GRT--C	114681.7			
_SMDG--C	-253930.6			
_BGR--C	969063.5			
_BDG--C	445766.3			
_CRB--C	18101.68			
_TSK--C	-21289.08			
_BJR--C	-620483.1			

_BKS--C	82869.37
_DPK--C	-443390.3
_SKBM--C	223394.2
_CMH--C	-656113.2
_PGDR--C	-629836.4

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.893657	Mean dependent var	837821.9
Adjusted R-squared	0.872941	S.D. dependent var	536718.9
S.E. of regression	191315.1	Akaike info criterion	27.31296
Sum squared resid	5.64E+12	Schwarz criterion	27.85259
Log likelihood	-2495.449	Hannan-Quinn criter.	27.53166
F-statistic	43.13826	Durbin-Watson stat	1.080743
Prob(F-statistic)	0.000000		



Dari hasil regresi panel data dengan menggunakan fixed effect, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{it} + \beta_2 \ln X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 \ln X_{it} + e_{it}$$

$$\ln Y_{it} = 661848.6 + -0.103773 \ln X_1 - 1.25E-08 \ln X_2 + 4.940042 \ln X_3 + 6374.042 \ln X_4 + e_{it}$$

$$R^2 = 0.893657 \quad N = 38 \quad F\text{-stat} = 43.13826$$

**Tabel 4.3**  
**Hasil Estimasi *Random effect***

Dependent Variable: Y?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 12/12/17 Time: 01:24  
Sample: 2010 2016  
Included observations: 7  
Cross-sections included: 27  
Total pool (unbalanced) observations: 185  
Swamy and Arora estimator of component variances

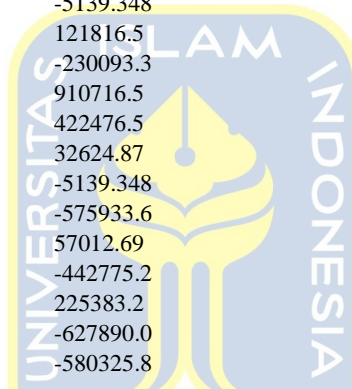
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	634463.4	90047.00	7.045914	0.0000



X1?	-0.109417	0.045283	-2.416283	0.0167
X2?	-1.17E-08	4.06E-09	-2.871695	0.0046
X3?	5.225951	0.611321	8.548621	0.0000
X4?	7159.209	3196.230	2.239892	0.0263

Random Effects (Cross)

_KRW--C	33536.71
_BKS--C	57012.69
_PWK--C	41695.47
_BGR--C	910716.5
_BDG--C	422476.5
_BBRT--C	-115746.1
_CRB--C	32624.87
_MJK--C	-144466.5
_KNG--C	-298866.6
_IDMY--C	-248240.1
_SBG--C	-22099.41
_SKBM--C	225383.2
_CJR--C	-39734.98
_CMS--C	-157025.9
_TSK--C	-5139.348
_GRT--C	121816.5
_SMDG--C	-230093.3
_BGR--C	910716.5
_BDG--C	422476.5
_CRB--C	32624.87
_TSK--C	-5139.348
_BJR--C	-575933.6
_BKS--C	57012.69
_DPK--C	-442775.2
_SKBM--C	225383.2
_CMH--C	-627890.0
_PGDR--C	-580325.8



Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	340081.6	0.7596
Idiosyncratic random	191315.1	0.2404

Weighted Statistics

R-squared	0.382963	Mean dependent var	175282.6
Adjusted R-squared	0.369252	S.D. dependent var	245851.2
S.E. of regression	195349.4	Sum squared resid	6.87E+12
F-statistic	27.92923	Durbin-Watson stat	0.881006
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.365184	Mean dependent var	837821.9
Sum squared resid	3.36E+13	Durbin-Watson stat	0.179852

Dari hasil regresi panel data dengan menggunakan fixed effect, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{it} + \beta_2 \ln X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 \ln X_{it} + e_{it}$$

$$\ln Y_{it} = 634463.4 + -0.109417 \ln X_1 + -1.17E-08 \ln X_2 + 5.225951 \ln X_3 + 7159.209 \ln X_4 + e_{it}$$

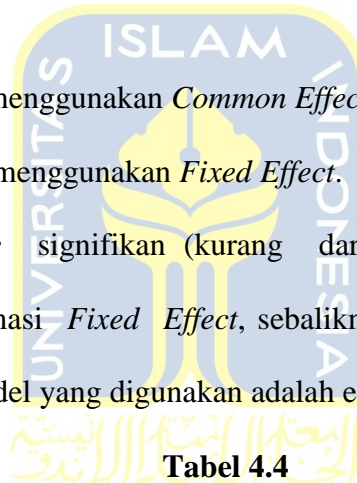
$$R^2 = 0.382963 \quad N = 38 \quad F\text{-stat} = 27.92923$$

#### 4.2 Hasil Uji F-statistik (*Chow Test*)

Uji F-statistik atau *Chow Test* di gunakan untuk menentukan model yang akan digunakan antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect*, dengan malakukan uji hipotesis:

1.  $H_0$  : memilih menggunakan *Common Effect*.
2.  $H_1$  : memilih menggunakan *Fixed Effect*.

Apabila *p-value* signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *Fixed Effect*, sebaliknya jika *p-value* tidak signifikan (lebih besar dari 5%) model yang digunakan adalah estimasi *Common Effect*.



**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji *Chow Test***

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	25.239542	(26,154)	0.0000
Cross-section Chi-square	307.167191	26	0.0000

*Sumber : olahan data eviews-9*

Nilai distribusi dari Chi-square dari perhitungan menggunakan *e-views 9* adalah sebesar 307.167191 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), sehingga secara

statistic  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Fixed Effect*.

### 4.3 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang akan digunakan antara *Fixed Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan uji hipotesis:

1.  $H_0$  : memilih menggunakan *Fixed Effect*.
2.  $H_1$  : memilih menggunakan *Random Effect*.

Apabila terlihat p-value signifikan (kurang dari 5%) model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, sebaliknya bila p-value tidak signifikan (lebih besar dari 5%) maka model yang digunakan adalah *Random Effect*.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.181875	4	0.0160

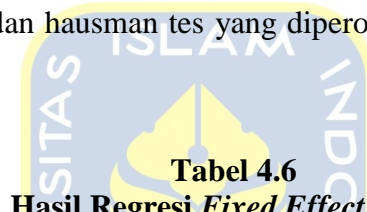
Sumber : olahan data *eviews-9*

Nilai 12.181875 distribusi dari *Chi-square* dari perhitungan menggunakan *E-views 9* adalah sebesar dengan probabilitas 0.0160 (kurang dari 5%), sehingga secara statistic  $H_0$  menerima dan menolak  $H_1$ , maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Fixed Effect*. Setelah

membandingkan hasil uji tersebut maka penulis memakai model estimasi *Fixed Effect*.

#### 4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui parameter signifikan atau tidak dalam analisis data panel dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansinya (nilai  $\alpha$ ). Ketika nilai probabilitas < nilai  $\alpha = 0.05$  maka variabel tersebut dinyatakan signifikan dan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasil regresi setelah membandingkan tiga model data panel dengan uji chow dan hausman tes yang diperoleh bahwa adalah model terbaik yang digunakan



**Tabel 4.6**  
**Hasil Regresi *Fixed Effect Model***

Variabel	Fixed Effect Model			
	Variabel dependen lnYit			
	Koefesien	std eror	T-Statistik	Probabilitas
C	661848.6	73416.73	9.014957	0.0000
X1	-0.103773	0.046090	-2.251512	0.0258
X2	-1.25E-08	4.15E-09	-3.006170	0.0031
X3	4.940042	0.631645	7.820915	0.0000
X4	6374.042	3865.952	1.648764	0.1012
R-Squared 0.893657				
F-Statistik 43.13826				
Prob(F-statistik) 0.00000				

Sumber: hasil olah data pada *Eviews 9*

#### 4.4.1 $R^2$

Nilai  $R^2$  menunjukkan besarnya variable independent mempengaruhi variable dependent. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai  $R^2$ , maka besar pengaruh variabel independen terhadap jumlah orang yang bekerja begitu juga sebaliknya semakin kecil nilai  $R^2$  semakin sedikit pengaruh variabel independen terhadap jumlah orang yang bekerja.

Dari hasil regresi diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.893657 artinya bahwa 89,36 % variabel jumlah orang yang bekerja (Y) dijelaskan oleh variabel UMK (X1), Investasi PMA (X2), Tingkat Pendidikan (X3), dan PDRB (X4). Sedangkan sisanya sebesar dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 4.4.2 Uji F

Uji Statistik F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan probabilitas F dengan nilai  $\alpha = 0.05$  atau 5% Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$$H_0 : \beta_{1,2,3,4} = 0 \text{ (tidak signifikan)}$$

$$H_1 : \beta_{1,2,3,4} \neq 0 \text{ (signifikan)}$$

Dari hasil regresi diperoleh nilai probabilitas (F-statistic) sebesar  $0.00000 < \alpha = 0.05$  yang artinya menerima  $H_1$  maka variabel UMK (X1), Investasi PMA (X2), tingkat pendidikan (X3), dan PDRB (X4) secara serentak signifikan terhadap variabel tenaga kerja (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

### 4.4.3 Uji T

#### 1. UMK (X1)

Sesuai estimasi Fixed Effect menjelaskan bahwa variabel UMK (X1) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0258 yang berarti lebih kecil ( $<$ ) dari nilai  $\alpha = 0.05$  sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang artinya variabel UMK berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

#### 2. Investsai PMA (X2)

Sesuai dengan estimasi Fixed Effect menjelaskan bahwa variabel belanja daerah (X2) mempunyai nilai koefisien -0.0000000125 dan probabilitas sebesar 0.0031 yang artinya lebih kecil ( $<$ ) dari nilai  $\alpha = 0.05$  sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang artinya variabel Investasi PMA berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

#### 3. Tingkat Pendidikan (X3)

Variabel Tingkat Pendidikan (X3) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti lebih kecil ( $<$ ) dari nilai  $\alpha = 0.05$  sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang artinya variabel investasi PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

#### 4. PDRB (X4)

Variabel PDRB (X4) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.1012 yang berarti lebih besar ( $>$ ) dari nilai  $\alpha = 0.10$  sehingga menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang artinya variabel PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

#### 4.5. Interpretasi

Dari hasil regresi serta persamaan regresi yang telah dikemukakan maka dapat diinterpretasikan terhadap hipotesis yang telah diambil sebelumnya. Adapun interpretasinya adalah:

1. Dari hasil olah data diatas UMK memiliki koefisien negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sulistiawati (2012).
2. Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk (2014) yang menjelaskan bahwa PMA memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.
3. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal tersebut dapat dilihat melalui hasil dari olah data yang menunjukkan hubungan positif terhadap variable penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Purnami (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
4. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

## 1) Analisis UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada penelitian ini seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa UMK mempunyai nilai koefisien  $-0.103773$  dan probabilitas sebesar  $0.0258$  yang artinya berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini, jika terjadi kenaikan upah sebesar 1 rupiah akan mengurangi tenaga kerja sebesar  $0.103773$

Menurut BPS Provinsi Jawa Barat (2016:6) terhitung pada tahun 2016, jumlah pekerja formal mencapai  $48,92\%$  sedangkan pekerja informal mencapai  $51,08\%$ . Upah di sektor informal tidak diregulasi dan sektor ini mempunyai kualitas angkatan kerja yang masih sangat rendah, sehingga mempunyai kesempatan yang terbatas untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Di sisi lain, kegiatan ekonomi formal ditandai dengan upah rata-rata yang lebih tinggi dari UMP serta kondisi kerja yang relatif baik, namun masih belum dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (Sulistiawati, 2012).

## 2) Investasi (Penanaman Modal Asing)

Investasi asing memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai probabilitas  $0.0258 < 0,05$  yang artinya berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, koefisien dari variabel investasi adalah negatif dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai koefisien investasi adalah  $-0.0000000125$  Artinya ketika investasi asing meningkat 1 Rupiah akan mengurangi tenaga kerja sebesar  $0.0000000125$ . hal itu dapat terjadi ketika investasi mengalami peningkatan namun tidak maksimal dalam menyerap tenaga kerja, Negara-negara maju yang menanam investasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat lebih mengarah kepada investasi padat modal, yang artinya investasi yang tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga



kerja, akibatnya penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguranpun tidak berjalan baik.

Sebab lainnya juga seperti yang dikemukakan oleh Todaro (2000), adalah hubungan yang tidak sinkron antara investasi dan kesempatan kerja terjadi karena adanya akumulasi modal untuk pembelian mesin dan peralatan canggih yang tidakhanya memboroskan keuangan domestik serta devisa tetapi juga menghambat upaya-upaya dalam rangka menciptakan pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru.

Sedangkan investasi menurut Sukirno (2012) kegiatan investasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan investasi bersumber dari tiga fungsi, yaitu:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga dengan meningkatnya investasi akan mempengaruhi peningkatan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal merupakan akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Investasi akan selalu diikuti perkembangan teknologi.

### **3) Tingkat Pendidikan**

Hasil penelitian variabel tingkat pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai probabilitas 0.0000 dengan nilai koefisien 4.940042. Setiap kenaikan tingkat pendidikan 1 Jiwa angkatan

meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 4.940042 Artinya tingkat pendidikan yang telah raih masyarakat sangat berkontribusi dalam memperoleh kesempatan kerja.

Penelitian ini sesuai dengan teori (Todaro, 2012) yang menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

#### **4) PDRB**

Dari hasil regresi yang dilakukan PDRB memiliki nilai koefisien 6374.042 yang artinya setiap kenaikan jumlah PDRB sebesar 1 Rupiah maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sebesar 6374.042 penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruliansyah (2012) yang berjudul “Analisis Hubungan Antara PDRB, realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan Kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur” Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang dapat di cerminkan melalui pertumbuhan PDRB yang semakin meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah proyek, seperti proyek UMKM. Sehingga terdapat pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

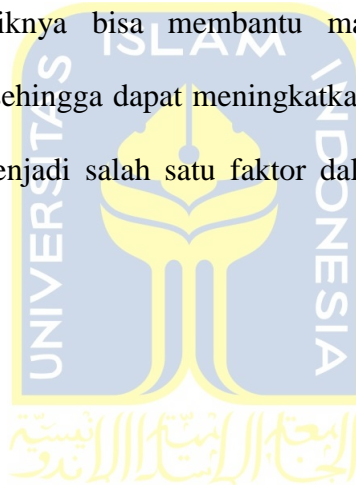
#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis ekonomi dari penelitian yang berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2010-2016” memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil Pada penelitian ini seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa UMK mempunyai nilai koefisien  $-0.103773$  dan probabilitas sebesar  $0.0258$  yang artinya berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja hal ini, jika terjadi kenaikan upah sebesar 1 rupiah akan mengurangi tenaga kerja sebesar  $0.103773$
2. Investasi PMA berpengaruh Investasi asing memikini hubungan negatif dengan nilai probabilitas  $0.0258$  koefisien  $-0.0000000125$  Artinya ketika investasi asing meningkat 1 Rupiah akan mengurangi tenaga kerja sebesar  $0.0000000125$ .
3. Tingkat Pendidikan variabel tingkat pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai probabilitas  $0.0000$  dengan nilai koefisien  $4.940042$ . Setiap kenaikan tingkat pendidikan 1 Jiwa angkatan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar  $4.940042$
4. PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di jawa barat. Hal tersebut sesuai dengan hasil regresi olah data yang telah di lakukan pada penelitian ini dengan nilai koefisien  $6374.042$ .
- 5.

## 5.2 Saran

1. Dalam menekan angka pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan harus terus dilakukan pemerintah agar kesejahteraan masyarakat Jawa Barat terus membaik sehingga menjauhi angka kemiskinan dan itu juga akan membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
2. Sebaiknya Pemerintah terus berperan aktif dalam proses penanaman modal asing di kabupaten/kota di Jawa Barat, agar investasi yang dilakukan terus tepat sasaran sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia
3. Pemerintah sebaiknya bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan produktifitasnya sehingga dapat meningkatkan PDRB perkapita di Jawa Barat perkapita bisa menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan pertumbuhan kota di Indonesia.

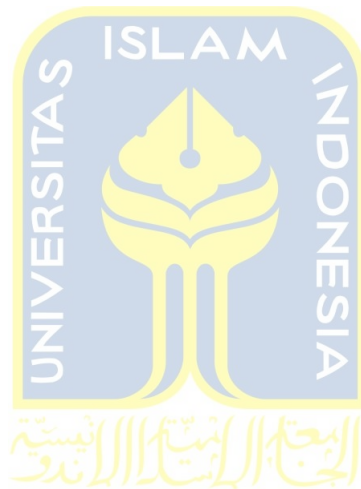


## Daftar Pustaka

- Bellante dan Jackson (1990). “*Ekonomi Ketenagakerjaan*”. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Danawati, Bendesa dan Utama. (2016). “*Pengaruh Pengeuaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisni Universitas Udayan Bali 5.7
- Deliarnov. (2014). “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*”. Rajawali Pers, Jakarta
- Feriyanto, Nur. (2014). “*Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*”. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Lestari, Yulia R (2017). Analisis Penyerapapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau Tahun 2012-2014. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Mankiw (2012). “*Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Asia Volume 2*”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mankiw (2014). “*Pengantar Ekonomi Mikro. Edisi Asia Volume 1*”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Pangastuti, Yulia. (2015). “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012*”. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Putra, RE. (2012). “*Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pendurungan Kota Semarang*”. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Purnami, Izatun (2015). “*Pengaruh Tingkat Pendiidkan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Provinis Jawa Barat Tahun 2010-2013*”. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [Skripsi].
- Prasetyo, Eko. 2011). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Periode Tahun 1985 – 2009. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

- Rudi, dkk, Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Palalawan. JOM FEKON 1. NO. 2 OKTOBER 2014
- Sandika, Maulida dan Setiawan. (2014). "*Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan*". Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru
- Saputro, 2014. Analisis Sektor UKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi D.I Yogyakarta. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Sarsi, Putro dan Sari. (2014). "*Pengaruh tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau*". JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). "*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*". Penerbit FE UI, Jakarta.
- Subri, Mulyadi. (2003). "*Ekonomi Sumber Daya Manusia Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*". Edisi ke I, Grafindo, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2012). "*Makro Ekonomi: Teori Pengantar*". Edisi ke 3. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sumarsono, Sonny (2009). "*Teori dan Kebijakan Publik, Ekonomi Sumber Daya Manusia*". Graha Ilmu, Yogyakarta
- Suparmoko dan Irawan. (2014). "*Ekonomika Pembangunan*". Edisi Ke 5, BPFE-Yogyakarta.
- Todaro dan Smith. (2011). "*Pembanguna Ekonomi*". Edisi ke 11. Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Todaro, 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga
- Widarjono, Agus. 2016. "*Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*". Edisi ke 4, cetakan ke 2. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Widarjono, Agus. 2016. "*Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*". Edisi ke 4, cetakan ke 2. UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Wijaya, Indrawati, dan Sari. (2014). “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau*”. JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.



### Data Panel Kabupaten/kota 2010-2016

Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4
Kabupaten Karawang	2010	949935.00	1111000.00	6583289156316.00	12673.00	46.47
Kabupaten Karawang	2011	978507.00	1159000.00	7091756392709.00	16427.00	52.10
Kabupaten Karawang	2012	1033921.00	1269227.00	8408696270742.00	28736.00	56.50
Kabupaten Karawang	2013	625060.00	2000000.00	36272453574090.00	34724.00	63.64
Kabupaten Karawang	2014	912864.00	2447450.00	34318564598268.00	62481.00	69.47
Kabupaten Karawang	2015	873995.00	2957450.00	29947118752905.00	67024.00	73.51
Kabupaten Karawang	2016	894738.00	3330505.00	8568230806243.00	74985.00	74.28
kabupaten Bekasi	2010	1257416.00	1168574.00	10197200783518.00	8947.00	58.09
kabupaten Bekasi	2011	1197928.00	1275000.00	13823960932092.00	10837.00	62.26
kabupaten Bekasi	2012	1200377.00	1491866.00	15241038566788.00	12783.00	65.24
kabupaten Bekasi	2013	256237.00	1693167.00	16136647564099.00	14572.00	45.22
kabupaten Bekasi	2014	375455.00	2100000.00	22937395480857.00	16491.00	49.99
kabupaten Bekasi	2015	536543.00	2600000.00	31017185437062.00	23265.00	54.61
kabupaten Bekasi	2016	638738.00	3261375.00	2274395002192.00	26823.00	55.45
kabupaten Purwakarta	2010	383080.00	890000.00	2509233860103.00	22845.00	32.61
kabupaten Purwakarta	2011	376068.00	961200.00	3290127830125.00	30494.00	35.77
kabupaten Purwakarta	2012	414313.00	1047500.00	3686512847698.00	42792.00	40.20
kabupaten Purwakarta	2013	988418.00	1388133.00	2628121433021.00	52978.00	19.93
kabupaten Purwakarta	2014	1490031.00	1735750.00	2876175210907.00	87424.00	22.01
kabupaten Purwakarta	2015	1938365.00	2001195.00	3359286256609.00	134784.00	24.28
kabupaten Purwakarta	2016	1892383.00	2927990.00	4200715382712.00	156329.00	26.35
Kabupaten Bogor	2010	1722345.00	1056914.00	792305628315.00	53067.00	19.30
Kabupaten Bogor	2011	1852165.00	1172060.00	1098003672952.00	58940.00	21.13
Kabupaten Bogor	2012	1995032.00	1269320.00	1561132942335.00	65847.00	23.72
Kabupaten Bogor	2013	1970852.00	2002000.00	2816569924045.00	77406.00	26.12
Kabupaten Bogor	2014	2137954.00	2442240.00	3357537547242.00	132733.00	28.38
Kabupaten Bogor	2015	2583234.00	2590000.00	4268307576809.00	199628.00	30.76
Kabupaten Bogor	2016	2673843.00	2960325.00	3948392792023.00	218375.00	32.62
Kabupaten Bandung	2010	1278093.00	1060500.00	719273926345.00	32973.00	15.11
Kabupaten Bandung	2011	1248267.00	1123000.00	852465273426.00	39082.00	16.45
Kabupaten Bandung	2012	1323166.00	1224442.00	980943376551.00	48946.00	17.98
Kabupaten Bandung	2013	988418.00	1388133.00	2628121433021.00	52978.00	19.93
Kabupaten Bandung	2014	1490031.00	1735750.00	2876175210907.00	87424.00	22.01
Kabupaten Bandung	2015	1938365.00	2001195.00	3359286256609.00	134784.00	24.28
Kabupaten Bandung	2016	1826372.00	2275715.00	3237484123312.00	158384.00	26.12
Kabupaten Bandung barat	2010	587.776,00	1105225.00	293738363682.00	21827.00	12.69



Kabupaten barat	Bandung	2011	659.501,00	1175959.00	317407390739.00	30293.00	13.61
Kabupaten barat	Bandung	2012	649.511,00	1236991.00	420585216068.00	38907.00	15.40
Kabupaten barat	Bandung	2013	447340.00	1396139.00	379361853249.00	43025.00	17.24
Kabupaten barat	Bandung	2014	585645.00	1738476.00	414003743266.00	65034.00	19.06
Kabupaten barat	Bandung	2015	663252.00	2004637.00	643676897699.00	78815.00	20.85
Kabupaten barat	Bandung	2016	675372.00	2280175.00	529300937463.00	90374.00	22.73
kabupaten Cirebon		2010	747544.00	825000.00	398403764385.00	8836.00	10.52
kabupaten Cirebon		2011	828506.00	923000.00	468425800435.00	10263.00	11.56
kabupaten Cirebon		2012	762065.00	956650.00	561909639833.00	14962.00	12.66
kabupaten Cirebon		2013	563190.00	1081300.00	288528088079.00	19124.00	14.05
kabupaten Cirebon		2014	752245.00	1212750.00	365425492847.00	29098.00	15.44
kabupaten Cirebon		2015	813824.00	1400000.00	597517678082.00	33408.00	16.81
kabupaten Cirebon		2016	819273.00	1592220.00	497953290563.00	38547.00	18.42
kabupaten Majalenka		2010	537671.00	720000.00	436484375904.00	8538.00	11.17
kabupaten Majalenka		2011	489817.00	763000.00	468394709743.00	9043.00	12.20
kabupaten Majalenka		2012	557086.00	800000.00	497352013063.00	13643.00	13.47
kabupaten Majalenka		2013	464478.00	850000.00	512475513790.00	16812.00	14.99
kabupaten Majalenka		2014	600843.00	1000000.00	624881137841.00	24680.00	16.32
kabupaten Majalenka		2015	680729.00	1245000.00	878273750785.00	27687.00	17.98
kabupaten Majalenka		2016	702370.00	1409360.00	906007453932.00	31946.00	18.65
kabupaten kuningan		2010	417310.00	700000.00	27393749304.00	11835.00	9.59
kabupaten kuningan		2011	425718.00	749000.00	33074638234.00	13745.00	10.55
kabupaten kuningan		2012	453382.00	805000.00	36640238965.00	15836.00	11.53
kabupaten kuningan		2013	291351.00	857000.00	37024209970.00	18854.00	12.91
kabupaten kuningan		2014	434948.00	1002000.00	39414806201.00	34060.00	14.32
kabupaten kuningan		2015	585712.00	1206000.00	47952588500.00	45948.00	16.11
kabupaten kuningan		2016	593637.00	1364760.00	49032754923.00	53832.00	18.23
kabupaten Indramayu		2010	678476.00	854145.00	93410394738.00	11846.00	29.09
kabupaten Indramayu		2011	702670.00	944190.00	102837612029.00	12036.00	32.74
kabupaten Indramayu		2012	732279.00	994864.00	115459500000.00	12846.00	35.70
kabupaten Indramayu		2013	471452.00	1250000.00	127867416693.00	14386.00	37.85
kabupaten Indramayu		2014	505180.00	1276320.00	556999969592.00	25766.00	40.26
kabupaten Indramayu		2015	677201.00	1465000.00	571875099709.00	37826.00	38.67
kabupaten Indramayu		2016	527382.00	1665810.00	590263728032.00	38165.00	39.98
kabupaten subang		2010	618117.00	746400.00	3735203684213.00	10253.00	13.67
kabupaten subang		2011	623501.00	791200.00	4025492392035.00	11605.00	14.57
kabupaten subang		2012	693303.00	862500.00	4273349907062.00	12944.00	15.27

kabupaten subang	2013	495525.00	1220000.00	4523593364095.00	13468.00	16.52
kabupaten subang	2014	680739.00	1577956.00	5468749819037.00	22368.00	17.72
kabupaten subang	2015	633116.00	1900000.00	4879212598958.00	27455.00	19.16
kabupaten subang	2016	657383.00	2149720.00	4982644083230.00	28706.00	20.85
kabupaten sukabumi	2010	858133.00	671500.00	2375673837493.00	9523.00	12.13
kabupaten sukabumi	2011	925205.00	850000.00	2507038362390.00	10239.00	13.19
kabupaten sukabumi	2012	958955.00	885000.00	2627117204655.00	13638.00	14.18
kabupaten sukabumi	2013	865645.00	1050000.00	2811381896096.00	17334.00	15.97
kabupaten sukabumi	2014	1004798.00	1565922.00	3251092260936.00	29353.00	17.55
kabupaten sukabumi	2015	912272.00	1940000.00	4313125676090.00	44356.00	19.28
kabupaten sukabumi	2016	1037394.00	2195435.00	4590362038500.00	52387.00	21.13
kabupaten cianjur	2010	833036.00	745700.00	729007835243.00	93803.00	9.01
kabupaten cianjur	2011	863044.00	810500.00	952426500624.00	96544.00	9.89
kabupaten cianjur	2012	899502.00	876500.00	1078561022874.00	101648.00	10.74
kabupaten cianjur	2013	600985.00	970000.00	1163861263952.00	22481.00	11.91
kabupaten cianjur	2014	878215.00	1500000.00	1542137260717.00	41939.00	12.94
kabupaten cianjur	2015	863592.00	1600000.00	1943971254589.00	60630.00	14.42
kabupaten cianjur	2016	856743.00	1837520.00	2106242073825.00	68467.00	15.79
kabupaten ciamis	2010	723004.00	699815.00	58263002525.00	8937.00	12.08
kabupaten ciamis	2011	648480.00	741800.00	70926347527.00	9038.00	13.37
kabupaten ciamis	2012	748629.00	793750.00	96246852021.00	14847.00	14.60
kabupaten ciamis	2013	437576.00	854075.00	103003734320.00	22610.00	16.16
kabupaten ciamis	2014	529286.00	1040928.00	117702349980.00	42421.00	17.55
kabupaten ciamis	2015	624078.00	1131862.00	120928382990.00	40833.00	19.28
kabupaten ciamis	2016	638283.00	1363319.00	142825389602.00	46946.00	21.51
kabupaten tasikmalaya	2010	756064.00	775000.00	62099624742.00	15674.00	9.39
kabupaten tasikmalaya	2011	677453.00	860000.00	80974042961.00	19267.00	10.33
kabupaten tasikmalaya	2012	811323.00	946000.00	92640252752.00	21873.00	11.13
kabupaten tasikmalaya	2013	480345.00	1035000.00	108134989592.00	25390.00	12.37
kabupaten tasikmalaya	2014	787281.00	1279329.00	137510912097.00	44092.00	13.44
kabupaten tasikmalaya	2015	824664.00	1435000.00	150523887599.00	33516.00	14.79
kabupaten tasikmalaya	2016	839287.00	1632360.00	169246409024.00	37846.00	15.21
kabupaten garut	2010	829818.00	735000.00	79201373920.00	5893.00	10.51
kabupaten garut	2011	904607.00	802000.00	86093426953.00	7842.00	11.47
kabupaten garut	2012	936552.00	880000.00	92730835274.00	19673.00	12.26
kabupaten garut	2013	634731.00	965000.00	109020315890.00	21812.00	13.46
kabupaten garut	2014	943727.00	1085000.00	122679154596.00	44134.00	14.68
kabupaten garut	2015	1090968.00	1250000.00	158423757868.00	65190.00	15.96
kabupaten garut	2016	1128493.00	1421625.00	160253824342.00	73947.00	16.72
kabupaten sumedang	2010	483406.00	1058978.00	120935825382.00	8743.00	13.33
kabupaten sumedang	2011	457222.00	1110130.00	142530890623.00	12037.00	14.77

kabupaten sumedang	2012	487639.00	1007500.00	156166218215.00	20728.00	16.23
kabupaten sumedang	2013	463784.00	1381700.00	184303191439.00	29215.00	18.01
kabupaten sumedang	2014	515735.00	1735473.00	261941046669.00	57765.00	19.75
kabupaten sumedang	2015	581029.00	2001950.00	291250786309.00	29351.00	21.83
kabupaten sumedang	2016	534345.00	2275715.00	320725432345.00	39176.00	23.15
kota bogor	2010	418742.00	971200.00	192093624347.00	18396.00	19.60
kota bogor	2011	436206.00	1.079.100	225374596903.00	22037.00	21.26
kota bogor	2012	422528.00	1174200.00	249035104700.00	35820.00	23.37
kota bogor	2013	292767.00	2002000.00	283031750676.00	40703.00	25.75
kota bogor	2014	415162.00	2352350.00	455428140938.00	70928.00	28.28
kota bogor	2015	520483.00	2658155.00	740956897856.00	86823.00	32.14
kota bogor	2016	532603.00	3022765.00	760263528232.00	91638.00	33.62
kota bandung	2010	1079477.00	1118000.00	579360026354.00	79373.00	42.35
kota bandung	2011	1129744.00	1188435.00	600253234165.00	84729.00	47.43
kota bandung	2012	1171551.00	1271625.00	624103940700.00	102732.00	53.99
kota bandung	2013	677481.00	1538703.00	583836466970.00	127206.00	61.74
kota bandung	2014	1096799.00	2000000.00	676175210907.00	220337.00	69.89
kota bandung	2015	1384989.00	2310000.00	795646877575.00	284843.00	78.91
kota bandung	2016	1394854.00	2626940.00	805284134232.00	319307.00	80.09
kota cirebon	2010	128772.00	840000.00	79023250802.00	7639.00	34.43
kota cirebon	2011	135247.00	906190.00	91260097352.00	8853.00	37.77
kota cirebon	2012	133261.00	980000.00	109234855000.00	10273.00	41.11
kota cirebon	2013	108493.00	1082500.00	145737969790.00	13494.00	45.11
kota cirebon	2014	130927.00	1226500.00	162838990135.00	23153.00	49.37
kota cirebon	2015	186821.00	1415000.00	197515597800.00	23946.00	54.32
kota cirebon	2016	198423.00	1608945.00	217539350032.00	28042.00	58.29
kota tasikmalaya	2010	284224.00	780000.00	70624199252.00	9573.00	14.52
kota tasikmalaya	2011	279238.00	865000.00	92982538290.00	12937.00	15.70
kota tasikmalaya	2012	295063.00	950000.00	117031753843.00	15324.00	17.10
kota tasikmalaya	2013	185844.00	1045000.00	123111046975.00	15053.00	18.87
kota tasikmalaya	2014	274001.00	1237000.00	132588492979.00	26492.00	20.81
kota tasikmalaya	2015	301406.00	1450000.00	151302723770.00	46612.00	23.17
kota tasikmalaya	2016	310245.00	1641280.00	170624382935.00	49373.00	24.48
kota banjar	2010	72195.00	689800.00	13089352835.00	2037.00	12.69
kota banjar	2011	76860.00	732000.00	15098342460.00	2539.00	13.80
kota banjar	2012	81719.00	780000.00	17310000000.00	3927.00	15.36
kota banjar	2013	49427.00	950000.00	22263726380.00	4706.00	15.36
kota banjar	2014	70287.00	1025000.00	31928271820.00	9499.00	16.68
kota banjar	2015	77929.00	1168000.00	35882322830.00	7974.00	18.36
kota banjar	2016	78363.00	1327965.00	38027352063.00	8653.00	20.32
kota bekasi	2010	1015941.00	1155000.00	801024389962.00	153904.00	17.52

kota bekasi	2011	1106920.00	1286421.00	902052835132.00	173930.00	19.01
kota bekasi	2012	1070719.00	1422252.00	1052438836481.00	190373.00	20.69
kota bekasi	2013	741539.00	2100000.00	1265112076090.00	214707.00	22.45
kota bekasi	2014	1120471.00	2441956.00	1376967628696.00	367825.00	24.26
kota bekasi	2015	1481926.00	2840000.00	1762515989877.00	329274.00	26.11
kota bekasi	2016	1537823.00	3327160.00	2082544382539.00	353936.00	28.32
kota depok	2010	779963.00	1157000.00	1600892538254.00	64834.00	15.15
kota depok	2011	815062.00	1243552.00	1802503824375.00	74384.00	16.23
kota depok	2012	828909.00	1424797.00	1948200041190.00	78294.00	17.59
kota depok	2013	585555.00	2042000.00	2145231944989.00	80654.00	19.69
kota depok	2014	877684.00	2397000.00	2440797432437.00	138834.00	21.54
kota depok	2015	896891.00	2705000.00	2885286250876.00	267428.00	23.05
kota depok	2016	899283.00	3046180.00	3022184326302.00	292642.00	24.93
kota sukabumi	2010	107612.00	850000.00	370362539273.00	84539.00	17.68
kota sukabumi	2011	133264.00	860000.00	392916342732.00	89735.00	19.44
kota sukabumi	2012	123630.00	890000.00	413353591980.00	95280.00	21.11
kota sukabumi	2013	80081.00	1050000.00	451381869083.00	13922.00	23.44
kota sukabumi	2014	122046.00	1565922.00	472300387890.00	24228.00	25.84
kota sukabumi	2015	133764.00	1572000.00	503125078694.00	12272.00	28.18
kota sukabumi	2016	146273.00	1834175.00	520186829042.00	15393.00	30.15
kota cimahi	2010	247612.00	1107314.00	22097352912.00	23649.00	24.88
kota cimahi	2011	251797.00	1172485.00	27242846342.00	27548.00	26.94
kota cimahi	2012	246912.00	1224442.00	29173003205.00	31463.00	29.32
kota cimahi	2013	156226.00	1388133.00	33889847080.00	32128.00	32.28
kota cimahi	2014	244278.00	1735473.00	36226829027.00	57131.00	35.48
kota cimahi	2015	257105.00	2001200.00	47023758890.00	44981.00	38.17
kota cimahi	2016	259832.00	2275715.00	49726853613.00	48394.00	40.06
kabupaten pangandaran	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kabupaten pangandaran	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kabupaten pangandaran	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kabupaten pangandaran	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kabupaten pangandaran	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kabupaten pangandaran	2015	192391.00	1165000.00	1583728370.00	14072.00	20.92
kabupaten pangandaran	2016	201826.00	1324620.00	1787396531.00	16805.00	22.38